



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2021

Selasa, 18 Januari 2022

EDISI: 00226630/GBP/1/2022

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-ip@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SELASA, 18 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - Indeks Pertanaman 400 (IP 400) (ID)..... 1
2. HORTIKULTURA :
 - Iklim Picu Kenaikan Harga Cabai (ST)..... 2-3
3. PERKEBUNAN :
 - Gapki Optimistis Prospek Harga Sawit 2022 Positif (ID)..... 4
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Taksi Alsintan Percepat Laju Roda Mekanisasi Pertanian (ST)..... 5-7
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Harga Minyak Goreng masih Tinggi (MI)..... 8
 - Bulog juga Pasokan dan Harga Beras (R)..... 9
 - ID Food Kembangkan Pertanian Digital (R)..... 10
 - ID Food Siap Salurkan Migor Milik PTPN Group (ID)..... 11
 - Berbagi Tugas Bulog dan Holding Pangan ID Food (KN)..... 12-13
 - Kendalikan Harga Pangan (R)..... 14-15
 - Presiden Ngobrol dengan Penjual Minyak Goreng “Kok Masih Rp 20.000” (RM) 16-17
 - Buwas: Stok Beras Pemerintah Januari-Maret 2022 Aman (ID)..... 18-19
6. PERTANIAN UMUM :
 - Ekspor Pertanian Naik 2,86% (ID)..... 20

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

OPINI/ARTIKEL :

- Ketimpangan Lahan (K)..... 21
- Kepada Milenial, Jadilah SDM Unggul dan Kuasai Pasar (ST)..... 22-23

00000000 O 00000000

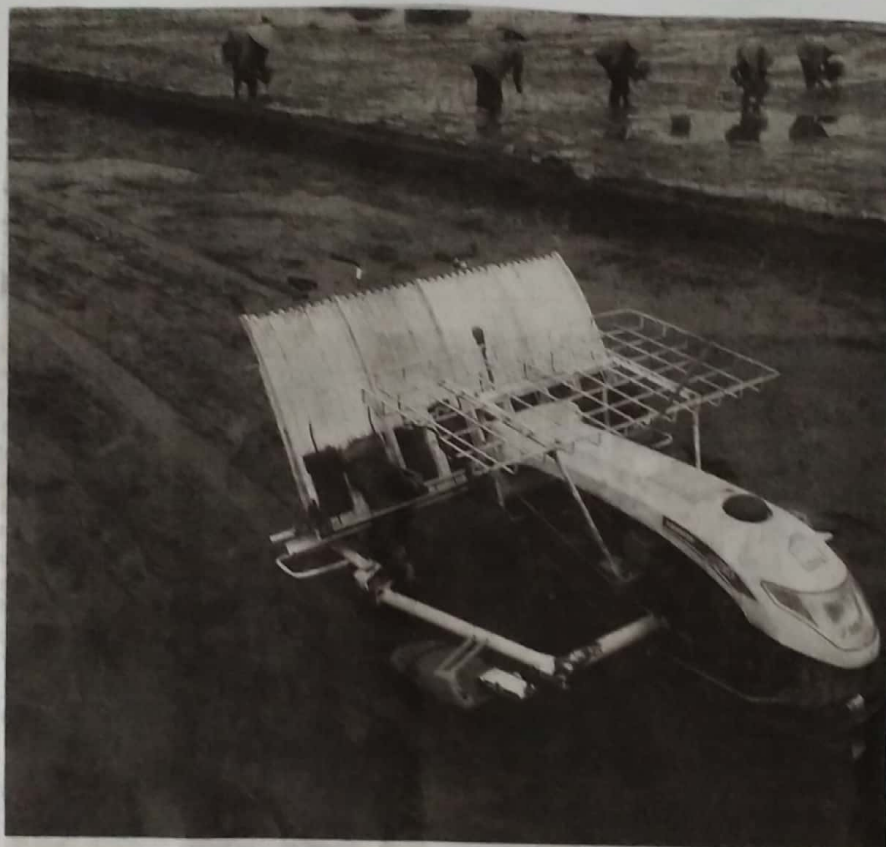
KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Indeks Pertanaman 400 (IP 400)

Sejumlah buruh tani menanam padi di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Pemerintah mencanangkan program Indeks Pertanaman 400 (IP 400) atau penanaman empat kali setahun di Kabupaten Klaten untuk mendongkrak produksi padi. 10 7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Iklim Picu Kenaikan Harga Cabai

Melambungnya harga cabai rawit di akhir tahun dipicu faktor iklim, sehingga menyebabkan pasokan berkurang. Sementara permintaan meningkat dengan menurunnya kasus Covid-19 dan pelonggaran aktivitas masyarakat.



Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Tommy Nugraha mengatakan, hampir seluruh lokasi sentra Tanah Air tengah hujan, sehingga menyebabkan beberapa tanaman cabai rusak, bahkan dua tahun terakhir ada La Nina.

"Kondisi iklim yang lembab tersebut membuat banyak tanaman terserang hama dan penyakit, seperti jamur. Tentunya lumayan mempengaruhi pertumbuhan tanaman," ujarnya.

Namun di sisi lain, ketika kondisi PPKM masuk level 1 dan banyak restoran/rumah makan dan tempat wisata mulai buka, permintaan ikut terkerek naik. "Ketika permintaan banyak, barang sedikit, maka otomatis harga meningkat," katanya.

Kondisi seperti itu diakui Tommy, kadang tidak bisa diprediksi. Bahkan yang juga tidak bisa pungkiri adalah kehadiran perusahaan besar ikut mempengaruhi pasokan. Mereka perlu banyak membutuhkan

cabai untuk industrinya.

Dikatakan, untuk menjaga pasokan cabai, pihaknya mencoba meningkatkan produksi di daerah yang tidak terkena banjir, khususnya di lahan dataran tinggi seperti Wonosobo, Jawa Tengah. Cara ini menjadi salah satu langkah meningkatkan jumlah produksi cabai nasional.

"Dengan bertanam cabai di dataran tinggi, minimal tidak terkena banjir, tidak terkena longsoang. Tinggal kita memelihara tanaman agar tidak terserang hama dan penyakit," katanya.

Kegiatan lainnya ungkap Tommy, Ditjen Hortikultura melakukan gerakan pengendalian hama dan penyakit di daerah sentra produksi cabai. Dalam gerakan ini pihaknya menurunkan tim dan menugaskan POPT yang ada di tiap provinsi untuk mengawal kondisi tanaman.

Selain itu kata Tommy, pemerintah kini menggerakkan masyarakat bertanam cabai

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

secara swadaya, termasuk di perkotaan. Dengan demikian, kebutuhan di kota besar seperti Semarang, Jakarta, Surabaya tidak akan kekurangan.

"Coba perhatikan sekarang, harga cabai sudah jauh menurun. Dalam data resmi sudah terlihat penurunannya. Jadi apa yang kita upayakan dan kerjakan Inshaa Allah membuahakan hasil," tegasnya.

Mengenai gejolak harga cabai yang terjadi setiap tahun? Tommy mengakui, memang setiap Oktober-Desember harga cabai selalu tinggi, tapi pada Januari akan kembali menurun dengan sendirinya. Untuk mengetahui kondisi produksi, Ditjen Hortikultura sudah memiliki Early Warning System (EWS).

Data EWS pada Desember tahun 2021 produksinya mencapai 88.801 ton dan kebutuhannya 80.764 ton, sehingga masih surplus 7.237 ton. Untuk Januari 2022, produksi cabai mencapai 81.943 ton dengan kebutuhan hanya 73.984 ton, sehingga masih surplus 7.959 ton. "Dari data EWS, kami melihat dari sisi produksi sebetulnya masih cukup," katanya. **Echa/Yul**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Gapki Optimistis Prospek Harga Sawit 2022 Positif

PONTIANAK – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat (Gapki Kalbar) optimistis pada 2022 prospek harga sawit tetap stabil positif seperti tahun sebelumnya. Harga minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) maupun minyak kernel (*palm kernel oil*/PKO) di pasar global akan mendapatkan pengaruh positif dari kebijakan Pemerintah Indonesia terkait program bio-diesel (B30) dan strategi pembatasan ekspor CPO.

Setidaknya, harga yang diperoleh pada 2021 dapat dipertahankan. Tren harga bergerak positif sepanjang 2021 dengan rata-rata harga CPO mencapai Rp 10.117,6 per kilogram (kg), PKO Rp 6.523,4 per kg dan tandan buah segara (TBS) sawit rata-rata Rp 2.266,6 per kg. "Kami optimistis 2022 ini harga positif," ujar Ketua Gapki Kalbar Purwanti Munawir di Pontianak, Senin (17/1).

Meski harga tetap membaik, pengelolaan sisi penerimaan petani harus perlu mendapat perhatian yang baik, terutama dalam mengantisipasi kenaikan beberapa komponen sarana produksi seperti pupuk. "Kemudian tak kalah pentingnya bagaimana semua pihak yang berkepentingan atas peluang kenaikan produksi dan harga pada 2022 secara bersama dapat mengawal agar investasi di perkebunan kelapa sawit ini tetap kondusif, serta mampu menangkul gerakan kampanye negatif melalui isu lingkungan maupun tenaga kerja," kata dia.

Sebagai salah satu komoditas ekspor yang berperan strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah, luas perkebunan kelapa sawit di Kalbar saat ini telah mencapai 1,9 juta hektare (ha) dengan produksi 2021 mencapai 4,9 juta ton dan tahun ini tingkat produksi maupun produktivitas sawit diperkirakan dapat tumbuh 2,9% dari tahun lalu.

Sebagai bentuk komitmen Gapki Kalbar dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan terus mendorong anggota untuk mengikuti program ISPO/RSPO. Sampai akhir 2021, tercatat dari 76 perusahaan anggota Gapki Kalbar sebanyak 30 perusahaan telah memiliki sertifikat ISPO, sedangkan 46 perusahaan anggota dalam proses penilaian oleh lembaga sertifikasi ISPO yang ditunjuk. (tl/ant) 19.7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Taksi Alsintan Percepat Laju Roda Mekanisasi Pertanian



Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menggelontorkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dalam jumlah cukup besar. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan tersebut, pemerintah membuat program Taksi Alsintan.

Upaya pemerintah mendorong penggunaan alsintan di petani, berlangsung sejak tahun 2015. Saat itu, Kementerian Pertanian melakukan perubahan kebijakan dalam alokasi belanja pertanian dengan mendistribusikan ribuan alsintan. Hingga 2019, pemerintah telah menginvestasikan sebanyak Rp 12,5 triliun untuk pengadaan alsintan.

Total yang telah terdistribusi

ke petani sebanyak 463.009 unit alsintan pra panen. Dengan rincian traktor roda dua (TR2) 140.308 unit, traktor roda empat (TR4) 11.118 unit, pompa air 107.633 unit, rice transplanter atau alat tanam 19.966 unit, cultivator 13.735 unit, excavator mini 453 unit, excavator standar 416 unit, handsprayer 154.166 unit, implement alat tanam jagung 1.940 unit, combine harvester dan beberapa unit alsintan lainnya.

Sedangkan pada tahun 2021,

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menyiapkan sebanyak 34.356 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menggenjot produktivitas pertanian. Alsintan yang disiapkan tersebut, terdiri dari Cultivator sebanyak 3.000 unit, Handsprayer 17.800 unit, Pompa Air 7.000 unit, Rice Transplanter 360 unit, Traktor Roda Dua 5.596 unit, Traktor Roda Empat 600 unit. Dengan alsintan, Kementan ingin memastikan penyediaan pangan tidak terkendala.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil mengatakan, selama ini bantuan alsintan sudah banyak digelontorkan ke kelompok tani. Namun oleh petani tidak dilakukan perawatan, sehingga rusak, bahkan ada yang dijual. "Seharusnya kalau habis pakai bawa pulang, cuci, bersihkan. Lakukan maintenance atau dirawat. Jangan rusak sedikit saja dijual," sesalnya.

Massalisasi Alsintan

Dengan kondisi yang terjadi di lapangan, tahun 2022 Kementerian Pertanian akan meluncurkan program alsintan yang terbaru yaitu Taksi Alsintan. Program tersebut sudah disampaikan Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo. "Maksud program ini adalah bagaimana memfasilitasi alsintan kita yang notabene-nya masih jauh dibandingkan dengan Amerika dan Jepang," katanya.

Melihat keberadaan bantuan alsintan, ternyata mampu mengangkat level mekanisasi. Misalnya, pada 2014 level mekanisasi baru 0,22 Horse Power (HP) per hektar, dalam tempo lima tahun naik menjadi 1,68 HP per hektar. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat masih relatif kecil. Negara Paman Sam level mekanisasinya sudah 17 HP per hektar. Bahkan dengan negara Asean pun, Indonesia terbelakang masih lebih rendah. Negeri Jiran Malaysia sudah 2,4 HP, Thailand 2,5 HP per hektar. Indonesia unggul sedikit dengan Vietnam yang hanya 1,5 HP per hektar.

Selama ini Ali Jamil menilai, massalisasi alsintan melalui

program brigade alsintan dan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) masih sangat kurang. Untuk itu pada Tahun 2022, pemerintah akan bergerak cepat dan Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) baik BNI, Mandiri, maupun BRI sudah memiliki komitmen untuk membiayai melalui KUR untuk program Taksi Alsintan ini.

"Program Taksi Alsintan terbilang unik karena tidak menggunakan Anggaran dan Belanja Negara. Saya menargetkan untuk tahun 2022, satu kabupaten ada dua unit Taksi Alsintan. Dengan begitu, saya berharap massalisasi alsintan ini bisa menaikkan level pertanian Indonesia di masa yang akan datang," tuturnya.

Ide Taksi Alsintan ini disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat menjadi Bupati Gowa. "Ternyata alsintan itu pernah ditaksiran atau disewakan seperti taksi pada umumnya," katanya.

Dengan adanya Taksi Alsintan, petani bisa pesan melalui online bila ingin mengolah lahan pertanian dengan luasan yang disesuaikan daerahnya. Bisa roda 2 atau roda 4 atau alsintan untuk panen. "Itulah yang dibutuhkan melalui Taksi Alsintan. Tahun 2022 ini akan bergerak cepat kita akan adakan Rakornas," tegasnya.

Ali Jamil menegaskan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, alsintan harus digerakkan. Diperkirakan kebutuhan alsintan kini mencapai 1 juta unit. Tiap 1 unit traktor bisa menggarap 4 ha/hari.

"Saat ini yang kita butuhkan waktu pengolahan lahan harus cepat, lahan jangan dibiarkan lama tidak ditanami, olah lahan harus terus dipercepat. Untuk itu harus

inipakai mekanisasi semu, sehingga bisa tercapai 1 tahun 4 kali panen," katanya.

Jadi Peluang Usaha

Bagi yang ingin membuka usaha Taksi Alsintan, Ali Jamil mengatakan, bisa melalui pinjaman KUR di perbankan. Artinya, setiap

Alsintan dapat meningkatkan efisiensi waktu kerja, biaya kerja, dan mengurangi susut hasil

Kegiatan	Waktu Kerja (jam/ha)		Efisiensi waktu kerja		Biaya Kerja (Rp/ha)		Efisiensi Biaya Kerja	
	Manual	Alsintan	(jam/ha)	(%)	Manual	Alsintan	(Rp/ha)	(%)
Pengolahan tanah	320 - 400	4 - 6	350,0	97,4	2 jt	1,2 jt	800.000	40,0
Penanam	200	4,5	196,0	98,0	750 rb	600 rb	150.000	20,0
Penyiangan	130	15	115,0	88,5	1,05 jt	750 rb	300.000	28,6
Combine Harvester	252	3,5	248,5	98,6	2,6 jt	1,9 jt	700.000	26,9

Kegiatan	Susut Hasil (%)		Efisiensi (%)
	Manual	Alsintan	
Combine Harvester	9,4	3	68,1
Perontokan padi	5	2	60,0

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 18/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 13 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☒ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

orang bisa melakukan pengadaan alsintan ini melalui bank. Kemudian, mengoperasikannya bersama-sama petani dengan sistem bagi hasil.

Ali Jamil berharap nantinya akan ada tanda tangan komitmen antara pengelola Taksi Alsintan dan lembaga pembiayaannya untuk KUR alsintan yakni anggota Himbara (Himpunan Bank Negara) Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Pihak perbankan sendiri sudah berkomitmen membiayai KUR untuk Taksi Alsintan ini.

"Hitungannya tiap satu unit Taksi Alsintan yang coverage area-nya 150 ha sekitar Rp 1,8 miliar ada roda dua, roda empat, combain harvester, dan lain sebagainya. Nantinya siapa pun boleh berusaha Taksi Alsintan," ujarnya. Siapa berminat? **Echa/Yul/Ditjen PSP**

3

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Minyak Goreng masih Tinggi

Presiden menyoal harga minyak goreng saat berkunjung ke Bandung. Menko Airlangga menargetkan harga turun, sehari lagi.

NAVIANDRI

naviandri@mediaindonesia.com

AWAL Januari lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perdagangan melakukan intervensi guna menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Pemerintah pun sudah menggelar operasi pasar di sejumlah daerah dengan menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. *M. J*

Namun, sampai kemarin, harga minyak goreng di pasar belum mau turun, baik curah maupun kemasan. Bahkan, di satu lokasi, sehari setelah operasi pasar, warga tetap harus membeli komoditas itu dengan harga Rp19 ribu-Rp22 ribu per liter.

Fakta itu juga yang ditemukan Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Pasar Sederhana, Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin. Ketika bertanya pada seorang pedagang tentang harga minyak goreng, Presiden kelihatan terkejut karena masih dibanderol Rp20 ribu per liter.

"Presiden heran kenapa harga minyak goreng masih tinggi," ujar Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang berada di samping Presiden saat berdialog dengan para pedagang.

Yana mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah daerah tidak memiliki

kewenangan dan kebijakan terkait dengan harga komoditas, termasuk minyak goreng.

Di Bandung, lanjutnya, operasi pasar murah minyak goreng sudah digelar, pekan lalu. Pembelinya dibatasi untuk warga yang mendapat surat undangan saja.

Harga turun

Jawaban atas pertanyaan kapan harga minyak goreng turun justru datang dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/1) malam, ia menargetkan harga minyak goreng akan normal dan turun menjadi Rp14 ribu per liter pada Rabu (19/1).

"Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya guna menstabilkan harga minyak goreng. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar sebagai upaya menekan harga yang terus melambung," tambahnya.

Kebijakan soal harga minyak goreng diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan sudah diterbitkan beberapa hari lalu. Airlangga mengumumkan pemerintah akan menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14 ribu per liter di seluruh Indonesia.

Jumlahnya mencapai 1,2 miliar liter untuk memasok hingga kurun enam bulan. Biaya selisih harga sebesar Rp3,6

triliun berasal dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Operasi pasar murah minyak goreng masih bergulir. Di Sumatra Selatan, pekan lalu sudah dimulai di sejumlah titik di Kota Palembang.

Pekan ini, operasi pasar berlanjut ke kabupaten dan kota lain. Kuota yang disiapkan mencapai 52.008 liter.

"Kami menambah kuota sebanyak 3 ton karena permintaan masyarakat masih sangat tinggi," kata Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Rizali.

Berbeda dengan tetangga daerahnya, Bangka Belitung. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tarmin AB, pihaknya masih menunggu program operasi pasar dari pemerintah pusat.

"Belum ada OP. Harga minyak goreng di pasar masih Rp18 ribu-Rp19 ribu per liter," paparnya.

Operasi pasar sudah digelar di Banyuwangi, Jawa Tengah. Namun, harga minyak goreng masih tinggi.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purwadi Santoso mengaku sudah mengajukan OP lagi ke pemerintah pusat. "Kami ajukan 6.000-an liter." (LN/DW/RF/LD/AD/RZ/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 16/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bulog Jaga Pasokan dan Harga Beras

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Perum Bulog terus menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, terutama beras, dapat terjaga selama pandemi Covid-19. Bulog mewaspadai kenaikan harga beras pada awal tahun ini.

"Harga beras selama 2021 terlihat stabil, bahkan memberikan andil negatif terhadap inflasi pada beberapa bulan sepanjang 2021," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (17/1). R-5

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, mengatakan, jumlah ketersediaan beras hingga akhir 2021 mencapai 1.002.771 ton yang terdiri atas 987.157 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 5.614 ton beras komersial. Buwas menjamin stok tersebut lebih dari cukup untuk stabilisasi pasokan dan harga beras hingga awal 2022.

Meski begitu, Bulog mewaspadai terjadi kenaikan harga beras pada awal tahun ini yang dipicu rendahnya panen pada November sampai Desember dan disertai dengan prakiraan terjadinya bencana hidrometeorologi pada awal 2022. "Diestimasikan harga beras akan terus meningkat pada Desember sampai Februari 2022," ujar Buwas.

Buwas menilai hal ini juga tak lepas dari penurunan stok di peng-

gilingan yang mana beberapa mitra penggilingan mulai mengumpulkan kembali stok berasnya dengan rencana pengisian pasokan pada Januari hingga Februari 22 sambil menunggu panen raya.

"Berakhirnya tahun anggaran 2021 sehingga banyak program pemerintah yang diakumulasi pada Desember 2021 menyebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat dan tingginya permintaan beras," ujar Buwas.

Guna mengamankan stok beras, Bulog menargetkan penyerap gabah dan beras hasil produksi petani sebanyak 4,14 juta ton pada triwulan I 2022 untuk kebutuhan stok CBP. Buwas menyebutkan, berdasarkan olahan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengamatan Bulog di lapangan, diperkirakan produksi terjadi pada Februari-Maret 2022.

"Dengan asumsi surplus produksi adalah sasaran utama penyerapan Bulog, potensi beras yang dapat diserap pada triwulan I 2022 sebanyak 4,14 juta ton beras," kata Buwas.

Buwas mengatakan, target dengan jumlah tersebut ideal untuk menjaga tingkat stok beras CBP sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton. Wilayah sentra beras yang berpotensi menghasilkan produksi yang besar, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan pada periode Ja-

nuari hingga Maret 2022.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan, intervensi pemerintah yang efektif dibutuhkan untuk menstabilkan sejumlah harga pangan yang melonjak jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan.

"Di negara kita hampir setiap tahun mengalami (kenaikan harga pangan) itu. Namun, mulai akhir tahun sampai awal tahun ini, harga pangan terutama sangat tinggi sekali," kata Anggia.

Anggia menegaskan, dibutuhkan kebijakan yang bisa menstabilkan harga dengan kehadiran negara melalui intervensi efektif. Menurut dia, tanpa adanya intervensi pemerintah yang efektif, kenaikan harga pangan ini menyebabkan situasi dan kondisi yang pelik.

"Ketika musim panen, harga pangan bisa jatuh di bawah harga pasaran, namun pada saat masa tanam, harga pangan bisa melonjak. Perlu diakui, petani diuntungkan jika harga pangan melonjak tajam. Akan tetapi, di sisi lain, daya beli konsumen menjadi turun tajam," kata Anggia.

Anggia berharap pemerintah tegas mengintervensi harga pangan agar stabil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan harga yang signifikan. Salah satu intervensi tersebut dengan menyediakan gudang penyimpanan sesuai standar. ■ antara ed: citra listya rini

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ID Food Kembangkan Pertanian Digital

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan atau ID Food mengembangkan pertanian digital untuk meningkatkan produktivitas dari berbagai sektor komoditas pangan yang dihasilkan dari anggota *holding*. Selain itu, ID Food didorong melakukan transformasi industri gula di Tanah Air.

Direktur Utama Food ID Arief Prasetya Adi mengatakan, ID Food akan membuat sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu mulai penanaman bibit hingga ke hilir diolah sebagai produk jadi untuk dipasarkan ke konsumen. Menurut Arief, sistem pertanian terintegrasi tersebut akan dilakukan secara digital dimulai dari penentuan titik lokasi tanam, pemantauan, dan perkembangan tanaman dengan digital *farming*.

"Beberapa tempat kita juga sudah siapkan semacam *drone* untuk *spray* pupuk, jadi mekanisasi pertanian," kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).

Pertanian digital yang tengah dilakukan oleh ID Food termasuk memantau perkembangan dan potensi cuaca yang terjadi selama dua atau tiga bulan ke depan untuk memaksimalkan pertanian.

"Kemudian data stok juga sudah kami koordinasikan, sudah mulai dikonsolidasikan di bebe-

rapa titik, termasuk pengiriman, distribusi ke warung pangan yang kurang lebih sekitar 60 ribu outlet itu sudah didigitalisasi. Jadi, *end-to-end* itu mulai dari produksi, *warehouse management system*, *inventory control*, sampai dengan penjualan di hilir kita sudah mulai siapkan digitalisasi," ujar Arief.

Ke depannya, Arief menambahkan, penggunaan sistem pertanian presisi dengan teknologi juga akan menjadi fokus dari ID Food. Arief menjelaskan, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan agar *holding* BUMN Pangan sudah harus masuk ke teknologi pertanian karena berbagai negara di luar negeri sudah sangat mutakhir dalam penerapannya.

Erick juga menyoroti produksi gula di Tanah Air. Ia berharap kegiatan *National Sugar Summit* (NSS) dapat merumuskan hasil keputusan yang nyata sebagai bagian dari transformasi ekosistem pangan.

"Saya berharap BUMN yang bergerak di industri gula harus terus ditingkatkan dan mengedepankan kolaborasi dan menjadi motor penggerak di industri gula nasional," ujar Erick.

PT RNI (Persero) atau ID Food bersama Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) menyampaikan sejumlah rumusan arah dan kebijakan industri gula nasional ke depan.

Terdapat beberapa hasil ru-

musan bersama AGI dan IKAGI, di antaranya resiliensi sektor pangan pada era pandemi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan sebesar 14 persen yang maba subsektor perkebunan menyumbang 26,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pertanian secara keseluruhan.

Direktur Komersial ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam industri gula, ID Food akan terus melakukan perbaikan kinerja dan pembenahan *basic operation*, baik dalam budidaya tebu maupun di pabrik pengolahan.

"Perbaikan ini dilakukan melalui pemurnian varietas penggunaan pupuk berimbang untuk meningkatkan produktivitas tebu per hektare. Perbaikan pada peralatan mesin juga dilakukan berkala untuk tetap menjaga performa giling tebu," kata Frans.

Frans menyebutkan, pada tahun lalu RNI, PTPN dan BUMN sektor lain, seperti BRI, Perhutani, Pupuk Indonesia (PIHC), Askrindo, dan Jasindo bersinergi melakukan kegiatan pertanian terpadu, yang melibatkan semua pemangku kepentingan di setiap mata rantai. Mulai dari pemilihan lahan, jenis komoditas, pendampingan teknis budidaya, permodalan, pemasaran, sampai ke asuransi pertanian. ■ antara ed: citra listya rini

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ID Food Siap Salurkan Migor Milik PTPN Group

JAKARTA – Holding BUMN Pangan, ID Food, akan menyalurkan minyak goreng (migor) yang diproduksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group. Saat ini, stok pangan ID Food, khusus migor, masih sedikit, per minggu kedua Januari 2022 hanya 1.106 kiloliter (kl). "Kami sedang berkoordinasi dengan PTPN Group agar secepatnya produksinya disalurkan ke ID Food," ungkap Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (17/1).

RNI merupakan perusahaan induk dari ID Food. Stok pangan lain di ID Food per minggu kedua Januari 2022 untuk beras mencapai 925 ton, benih padi 4.159 ton, benih jagung 56 ton, daging 2.014 ton, daging ayam 28 ton, ikan 432 ton, dan garam 203.515 ton. "RNI dan BUMN klaster pangan yang tergabung dalam ID Food untuk saat ini melakukan stok berdasarkan penjualan, sehingga tidak memiliki *buffer stock* yang masif untuk didistribusikan," ungkap Arief.

Arief memastikan, kehadiran ID Food tidak akan mengganggu peran Perum Bulog yang mana Perum Bulog masih sebagai operator dalam stabilisasi harga dan RNI dengan BUMN klaster pangan yang tergabung dalam ID Food melakukan bisnis komersial. ID Food akan terus memperluas penjualan termasuk pasar ekspor dengan adanya sinergi yang kuat antara hulu dan hilir dan diharapkan hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Menurut Arief, ID Food bisa menjadi solusi pangan karena pembentukannya mendapatkan dukungan dari 10 kementerian/lembaga (K/L). Dukungan yang cukup besar ini menjadi kekuatan dan menjadi bukti nyata bahwa Holding BUMN Pangan sangat ditunggu-tunggu. ID Food diharapkan bisa memberikan kinerja terbaik dan memperkuat *supply chain* pangan terintegrasi.



Arief Prasetyo Adi

Dalam program Makmur, ID Food berperan sebagai *oftaker* yang menyerap produksi petani. ID Food sudah mempunyai produk unggulan, mulai dari beras, minyak, hingga gula.

Dalam kesempatan itu, Arief menjelaskan, ID Food mengembangkan digitalisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dari berbagai sektor komoditas pangan yang dihasilkan dari anggota *holding*. ID Food akan membuat sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu mulai dari penanaman bibit hingga ke hilir diolah sebagai produk jadi untuk dipasarkan ke konsumen. "Sistem pertanian terintegrasi tersebut akan dilakukan secara digital dimulai dari penentuan titik lokasi tanam, pemantauan perkembangan tanaman dengan *digital farming*. Beberapa tempat kita juga sudah siapkan semacam *drone* untuk *spray* pupuk, jadi mekanisasi pertanian," kata Arief.

Selain itu, pertanian digital yang tengah dilakukan oleh ID Food termasuk memantau perkembangan dan potensi cuaca yang terjadi selama dua atau tiga bulan ke depan guna memaksimalkan pertanian. "Kemudian data stok

juga sudah kami koordinasikan, sudah mulai dikonsolidasikan di beberapa titik termasuk pengiriman, distribusi ke warung pangan yang kurang lebih sekitar 60 ribu *outlet* itu sudah di digitalisasi. Jadi *end-to-end* itu mulai dari produksi, *warehouse management system*, *inventory control*, sampai dengan penjualan di hilir kita sudah mulai siapkan digitalisasi," papar Arief.

Ke depannya, lanjut Arief, penggunaan sistem pertanian presisi dengan teknologi juga akan menjadi fokus dari ID Food. Menteri BUMN Erick Thohir mengarahkan agar Holding BUMN Pangan sudah harus masuk ke teknologi pertanian karena berbagai negara di luar negeri sudah sangat mutakhir dalam penerapannya. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 14 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Berbagi Tugas Bulog dan Holding Pangan ID Food

Holding BUMN Pangan akan fokus pada penjualan dengan stok yang dimiliki untuk komersial

**Abdul Basith Bardan,
Achmad Jatnika**

JAKARTA. Pada tanggal 7 Januari 2022 lalu, Holding Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Pangan dengan nama ID Food terbentuk. Perusahaan ini merupakan gabungan lima perusahaan BUMN Pangan yang mengalihkan sahamnya kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) selaku induk Holding BUMN Pangan.

Banyak kekhawatiran hadirnya Holding BUMN Pangan ini justru akan bertabrakan dengan tugas dan fungsi Perum Bulog yang juga merupakan perusahaan BUMN sektor pangan. Alhasil, butuh pembagian tugas yang jelas antara dua perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan, agar tak ada tumpang tindih, maka tugas kedua perusahaan ini harus dibedakan.

Dalam kesimpulan hasil rapat kerja Komisi IV DPR dengan Perum Bulog dan ID Food di gedung DPR RI, Senin (17/1), disepakati bahwa kedua BUMN ini harus punya rencana dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, namun dengan beda peran.

Sudin menjelaskan, Bulog berfungsi menyerap beras petani dan bertugas melaksanakan stabilisasi harga di pasar. Sedangkan ID Food bertugas untuk menjalin kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pemasaran dan pendistribusian produk pangan.

Direktur Utama ID Food Arief Prasetyo Adi memaparkan pendirian ID Food memang bukan menjadi stabilisator harga pangan. Adapun stok pangan yang mereka miliki berdasarkan kebutuhan penjualan. "RNI dan klaster pangan ini saat ini melakukan stok berdasarkan penjualan

jadi tidak memiliki *buffer stock* yang masif," ujar Arief.

Misalnya stok gula ID Food saat ini ada 19.794 ton, sementara stok beras 925 ton, stok benih padi 4.159 ton, stok benih jagung 56 ton, stok daging 2.014 ton, stok daging ayam 28 ton, stok ikan 432 ton, stok garam 203.515 ton, dan stok minyak goreng 1.106 kiloliter.

Arief juga menegaskan kehadiran ID Food tidak tumpang tindih dengan Bulog. Perum Bulog tetap memegang peran sebagai operator dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menambahkan, pihaknya tetap menjalankan penugasan pemerintah untuk menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penugasan stabilisasi harga.

"Ketersediaan beras Bulog saat ini adalah 1.002.771 ton, dengan CBP sebesar 997.157 ton dan sisanya beras komer-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 18/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 14 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

sial," kata pria yang akrab di-sapa Buwas tersebut.

Menurut Budi pada 2022, Bulog berupaya menyerap beras dari petani pada musim panen raya Maret-April nanti dengan potensi 4,14 juta ton. Namun, upaya menyerap be-

ras yang besar ini juga terken-dala dari sisi penyaluran. Se-jauh ini Bulog baru punya rencana pendistribusian beras di tahun 2022 sebanyak 1,25 juta ton, serta mengamankan stok CBP sebesar 1,5 juta ton untuk tahun ini.

Perbedaan Tugas dan Fungsi Perum Bulog vs ID Food

Perum Bulog	ID Food
Fokus pada komoditas beras melalui penyerapan gabah petani dan berperan dalam stabilisasi harga, baik harga gabah petani maupun harga beras di pasaran.	Fokus pada penyediaan beberapa produk pangan dari hulu ke hilir sehingga menekan impor pangan
Melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk komoditas beras dan pangan tertentu lain dengan tujuan stabilisasi harga, serta juga melaksanakan bisnis beras komersial.	Tidak menerima penugasan pemer-intah dan fokus menjalankan bisnis sebaik mungkin dengan orientasi komersial sehingga mampu memper-baiki kinerja perusahaan.
Menjalin kerjasama dengan petani sebanyak mungkin agar penyerapan maksimal, namun disisi lain harus menunggu perintah untuk mengelu-arkan beras yang diserap dari petani.	Menciptakan ekosistem kemitraan mulai dari petani di sector hulu, hingga UMKM dan perusahaan swasta di sector hilir untuk distribusi produk pangan.

Sumber: Hasil Wawancara dan Pemberitaan KONTAN

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kendalikan Harga Pangan

Pemerintah juga harus mewaspadaai dampak omikron terhadap angka kemiskinan.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
MURSALIN YASLAND

JAKARTA — Pemerintah diharapkan tak lepas berpuas diri dengan menurunnya jumlah penduduk miskin per September 2021. Tingkat kemiskinan masih rentan mengalami kenaikan seiring adanya beberapa dinamika pada tahun ini.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, angka kemiskinan bukan tidak mungkin untuk kembali meningkat. Sejumlah kenaikan harga-harga bahan pokok yang sedang terjadi berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. "Tarif-tarif yang ditentukan pemerintah juga berpengaruh," kata Yusuf kepada *Republika*, Senin (17/1).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/1) mengumumkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 sebanyak 26,5 juta orang atau turun 1,05 juta orang dibanding pada Maret 2021. Menurut catatan BPS, komoditas makanan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan pada September tahun lalu.

Yusuf mengatakan, turunnya ang-

ka kemiskinan merupakan dampak positif dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah. Selama 2021, realisasi anggaran untuk program PEN mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

Selain PEN, menurut dia, pelonggaran aktivitas perekonomian turut membantu dalam pengurangan kemiskinan. Kendati demikian, pemerintah juga masih harus mewaspadaai dampak dari timbulnya varian omikron. "Kemungkinan untuk meningkat ada saja, seandainya aktivitas ekonomi kembali terganggu dari adanya omikron," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, kenaikan cukai rokok tahun ini sebesar 22 persen pun dapat menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pihaknya sependapat untuk mengendalikan konsumsi rokok dengan menaikkan tarif cukai. Namun, kenaikan itu akan berdampak pada naiknya batas garis kemiskinan yang disebabkan dari rokok. Apalagi, data BPS menunjukkan, rokok menjadi penyumbang terbesar kedua garis kemiskinan.

Terlepas dari situasi tersebut, Yusuf mengatakan, kenaikan harga-harga tersebut dapat tetap diminimalkan dampaknya kepada kenaikan ke-

miskinan. "Tergantung seperti apa program pemerintah yang dianggarkan untuk masyarakat sebagai kompensasi dari naiknya berbagai harga-harga. Tidak hanya jumlah nominal bantuannya, tetapi seberapa banyak orang yang mampu menerima bantuan tersebut," ujar dia.

Besarnya pengaruh komoditas makanan terhadap garis kemiskinan juga disampaikan BPS di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan, besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2021 mencapai 75,29 persen. "Artinya, kenaikan harga pada bahan makanan di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan yang terjadi di Lam-



Sebaran varian omikron dikhawatirkan mengganggu pemulihan ekonomi.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

pung," katanya.

Retno menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tersisa 1,01 juta orang pada September 2021. Jumlah tersebut menurun 0,95 persen dari jumlah sebelumnya sebanyak 1,08 juta orang pada Maret 2021.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky berpendapat, penurunan kemiskinan sejalan dengan data-data ekonomi lainnya yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi sudah berjalan. Riefky mengatakan, dilihat dari neraca perdagangan selama tahun lalu, angka impor khususnya bahan baku dan barang modal naik drastis.

Menurut dia, hal itu mencerminkan sektor ekonomi domestik sudah kembali berekspansi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat kembali meningkat dan melewati batas garis kemiskinan. "Kemiskinan yang turun ini mengonfirmasi ada ekspansi dari dunia usaha sehingga perlahan pendapatan masyarakat sudah pulih, dari yang tadinya masuk ke dalam kategori miskin perlahan sudah bisa naik lagi," kata Riefky.

Memasuki 2022, ia menekankan, tantangan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tetap harus dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan faktor kesehatan. Apalagi, sebaran Covid-19 varian omikron yang terus naik dikhawatirkan mengganggu proses pemulihan ekonomi domestik.

■ ed: satria kartika yudha

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PRESIDEN NGOBROL DENGAN PENJUAL MINYAK GORENG

"Kok Masih Rp 20.000"

PEMERINTAH terus berupaya menurunkan harga minyak goreng. Salah satunya dengan mengguyur pasar 1,2 miliar liter minyak goreng murah, Rp 14 ribu per liter. Namun, saat mengecek di pasar, Presiden Jokowi kaget harganya masih Rp 20 ribuan per liter.

Kemarin, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, agenda Jokowi cukup padat. Dimulai dari peninjauan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta. Usai dari situ, ia meneruskan perjalanannya ke Kota Bandung. Di

sana, Jokowi menjadi pembicara di Universitas Parahyangan (Unpar). Usai dari Unpar, Jokowi meninjau Pasar Sederhana Bandung.

Di Pasar Sederhana, Jokowi menyerahkan bantuan tunai untuk pedagang sebagai tambahan modal agar bisa meringankan beban mereka karena terdampak pandemi Covid-19. Pada penyerahan bantuan, Jokowi didampingi Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. **Rm.1**

Dengan mengenakan setelan kemaja putih lengan panjang dan celana bahan hitam, Jokowi menyempatkan berbincang dengan para pedagang pasar. Salah satu yang ditanya Jokowi adalah mengenai harga bahan sembako.

Saat bertanya soal harga minyak goreng ke pedagang, mereka mengatakan harganya masih mahal. Per liternya masih Rp 20 ribu. Mendengar hal itu Jokowi kaget.

"Kenapa ini masih mahal Rp 20 ribu per liter," kata Yana menirukan ucapan Jokowi saat mengetahui harga minyak goreng masih mahal.

Menurut Yana, meski ini menjadi tanggung jawabnya, tapi pemda gerakannya terbatas dalam menjinakkan harga minyak goreng. Pasalnya, pemda tidak bisa mengintervensi harga minyak goreng karena suplainya berada di perusahaan dan pemerintah pusat.

"Kita menunggu pasokan karena operasional itu di Kementerian Perdagangan. Stoknya ada di sana," cetus Yana.

Menurut Yana, belum lama ini Pemkot Bandung bersama Pemprov Jawa Barat sudah menggelar operasi pasar menjual minyak goreng Rp 14 ribu per liter. Namun, sepertinya masih kurang sehingga bisa menurunkan harganya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sudah menggelar operasi pasar murah minyak goreng di 11 kabupaten/kota selama satu minggu, pekan lalu. Adapun 11 kabupaten/kotanya adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Moh Arifin Soedjayana mengatakan, suplai minyak goreng tersebut didapatkan dari dua produsen asal Bekasi dan DKI Jakarta. Kedua perusahaan ini mengalokasikan 240 ribu botol minyak goreng yang dikemas dalam 1 liter.

"Kebanyakan operasi pasar digelar di kota yang menyumbang inflasi cukup besar. Harga minyak goreng di operasi pasar ini dijual Rp 14 ribu per botol. Maksimal per orang itu 2 liter, tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan," terang Arifin.

Belum turunnya harganya minyak

goreng meski momen Natal dan Tahun Baru sudah lewat membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) curiga ada permainan kartel.

"YLKI menduga dengan kuat ada pihak-pihak tertentu yang mendistorsi pasar minyak goreng, khususnya yang berdimensi persaingan usaha tidak sehat, misalnya praktik kartel," kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Dia berpandangan kenaikan harga tidak wajar sekalipun harga CPO dunia melambung. Harga minyak goreng seharusnya bisa terkendali karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar.

Namun kecurigaan YLKI itu dibantah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Isy Karim mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi praktik kartel yang memicu harga minyak goreng melambung. Kondisi harga komoditas tersebut disebut lebih banyak dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.

Menurut dia, hanya sebagian kecil produsen minyak goreng yang menerima pasokan CPO dari kebun sawit kelolaan sendiri. Hal ini menyebabkan harga produk minyak goreng yang dihasilkan akan sangat tergantung dari harga pembelian CPO.

Pemerintah sebenarnya tidak diam saja melihat kondisi ini. Kemendag meluncurkan minyak goreng murah dengan harga Rp 14.000 per liter. Minyak ini diguyur ke pasar untuk menjinakkan harga. Holding BUMN Pangan (ID Food) juga memproduksi minyak goreng murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 18/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, masih mahal harga minyak goreng karena operasi pasar belum merata. Padahal seharusnya, kegiatan itu dilakukan di pusat kota yang rawan terjadi lonjakan.

"Jadi kalau sudah dilakukan operasi pasar tapi harga masih tinggi, itu indikator bahwa di situ belum tersentuh operasi pasar," duga Sarman saat dihubungi, tadi malam.

Lagipula, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus di minyak goreng, tetapi kebutuhan pokok lainnya. Terlebih, kurang dari 3 bulan, sudah memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingkat kebutuhan masyarakat akan naik 2-3 kali lipat.

Hal itu bisa diantisipasi jika stok dihitung matang sejak dini. Bahkan kalau perlu dibuka keran impor terhadap komoditas yang stoknya tidak memenuhi kebutuhan nasional.

Sebab itu, ia usul agar pemerintah melakukan operasi pasar secara serentak di berbagai daerah, utamanya yang memiliki konsumen lebih tinggi. Selanjutnya, memaksa pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) seperti batu bara. ■ MEN

2

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Buwas: Stok Beras Pemerintah Januari-Maret 2022 Aman

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog pada triwulan I-2022 akan ada di level aman sebesar 1-1,5 juta ton. Sebab, pada periode Januari-Maret tersebut, terdapat potensi beras petani yang dapat diserap Bulog sebanyak 4,14 juta ton.

Oleh Ridho Syukra

Budi Waseso yang diakrab Buwas itu mengatakan, Bulog sebagai operator stabilisasi harga pangan berkonsentrasi menyerap hasil produksi petani dalam negeri secara optimal, terutama saat produksi mengalami surplus. Hal itu bertujuan menstabilkan harga gabah atau beras yang berlebihan di tingkat hulu pada saat panen raya. "Berdasarkan olahan data BPS dan pengamatan kami di lapangan, diperkirakan (surplus) produksi terjadi pada Februari-Maret 2022. Dengan asumsi bahwa surplus produksi adalah sasaran utama penyerapan Bulog, maka potensi beras yang dapat diserap pada triwulan I-2022 sebanyak 4,14 juta ton, itu ideal untuk (kami) memenuhi kebutuhan stok (CBP) 1-1,5 juta ton," ujar dia.

Buwas mengatakan itu saat menjelaskan rencana kerja tahunan Bulog 2022 dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (17/1). Dalam proyeksi Bulog, yang didasarkan pada data kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengamatan di lapangan, produksi beras nasional pada triwulan I-2022 mencapai 11,61 juta ton, rinciannya pada Januari 1,3 juta ton, Februari 3,88 juta ton,



Budi Waseso

dan Maret 6,43 juta ton. Sementara, kebutuhan beras per bulan 2,49 juta ton atau 7,47 juta ton selama triwulan I-2022, sehingga total surplus periode itu 4,14 juta ton. Provinsi dengan produksi beras terbesar pada triwulan I-2022 adalah Jawa Tengah (2,68 juta ton), Jawa Timur (2,11 juta ton), Jawa Barat (1,75 juta ton), Sumatera Selatan (0,82 juta ton), dan Sulawesi Selatan (0,7 juta ton).

Buwas menuturkan, kondisi iklim selama triwulan IV-2021 dan triwulan I-2022 diperkirakan tidak ada anomali ekstrem kering dan tanpa kehadiran El Nino sehingga puncak panen akan terjadi pada Maret 2022. "Iklim mendukung, puncak panen terjadi Maret

2022," kata Buwas. Proyeksi produksi beras pada triwulan I-2022 sebesar 11,61 juta ton jauh lebih tinggi dari triwulan I-2021 yang hanya 10,12 juta ton, dari triwulan I-2020 sebesar 6,55 juta ton, dan dari triwulan I-2019 sebesar 9,5 juta ton. Pengadaan beras dalam negeri tahun ini ditargetkan 1,25 juta ton dan pengadaan dari luar negeri nihil. Pengadaan gabah/beras domestik oleh Bulog menunjukkan pada setiap tahunnya sesuai jumlah CBP yang ditentukan, pada 2019 sebesar 1,2 juta ton, pada 2020 sebesar 1,26 juta ton, dan pada 2021 sebesar 1,22 juta ton. 10.7

Selain menyerap gabah atau beras

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

“

Pengadaan beras dalam negeri tahun ini oleh Perum Bulog ditargetkan 1,25 juta ton dan pengadaan dari luar negeri nihil.

dalam negeri, tahun ini Bulog juga merencanakan pengadaan komoditas pangan lainnya yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan komersial perusahaan dan kemampuan penjualan. “Selain menstabilisasi harga di tingkat hulu, pada 2022, Bulog juga akan melaksanakan stabilisasi harga di tingkat hilir dengan melakukan kegiatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga (KPSH) dan kegiatan komersial lainnya melalui penjualan beras komersial dan komoditas pangan lainnya selain beras,” ungkap Buwas. Seluruh jajaran Bulog senantiasa berkomitmen terus menjaga ketahanan pangan nasional dan sangat membutuhkan dukungan parlemen, terutama dalam mendorong terciptanya kebijakan pangan terintegrasi hulu-hilir untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Capaian 2021

Sepanjang 2021, realisasi pengadaan

gabah dan beras petani dalam negeri oleh Bulog sebesar 1.216.281 ton. Sementara itu, realisasi penyaluran beras selama 2021 sebanyak 1.153.698 ton, terdiri atas program KPSH sebanyak 767.869 ton, tanggap darurat bencana 8.584 ton, golongan anggaran 89.245 ton, dan program bantuan beras PPKM 288 ribu ton. Harga beras selama 2021 terlihat stabil dan memberikan andil negatif terhadap inflasi. Dengan jumlah stok akhir beras 2021 mencapai 1.002.771 ton yang terdiri atas stok CBP 997.157 ton dan beras komersial 5.614 ton, jumlah stok tersebut sudah lebih dari cukup untuk melakukan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga hingga awal 2022.

Terkait realisasi CBP untuk beras bantuan PPKM tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian regulasi CBP yaitu revisi Peraturan Menteri Sosial No 22 Tahun 2019 dengan menambahkan pemanfaatan CBP untuk penyaluran beras. “Perum Bulog juga berperan menjaga stabilisasi harga daging dan telur ayam sepanjang tahun 2021 melalui penyaluran jagung Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) untuk pakan ternak sebesar 30 ribu ton,” ujar Buwas. Penyaluran telah tuntas 100% dengan sasaran wilayah Semarang, Solo, Cianjur, Banyumas, Malang, Probolinggo, Tulung Agung, dan Kediri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melunasi piutang Perum Bulog senilai Rp 4,5 triliun. Pembayaran utang pemerintah akan membantu mendorong operasional Perum Bulog untuk tahun ini. “Kami meminta Menteri Keuangan melunasi piutang Perum Bulog yang jumlahnya sangat besar,” ujar dia. (tl)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Ekspor Pertanian Naik 2,86%

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan sepanjang Januari-Desember 2021 mencapai US\$ 4,24 miliar atau naik 2,86% dibanding periode sama 2020 yang sebesar US\$ 4,12 miliar. Kenaikan ekspor tersebut dipicu oleh meningkatnya ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah.

Menurut BPS, ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Desember 2021 hanya US\$ 400,6 juta atau turun 7,51% dari Desember 2020 yang sebesar US\$ 433,1 juta, sedangkan bila dibandingkan November 2021 yang sebesar US\$ 428,5 juta maka turun sebesar 6,52%. Penurunan itu didorong oleh merosotnya ekspor komoditas kopi. "Namun ekspor pertanian pada Januari-Desember 2021 naik 2,86% dibanding periode sama 2020 dengan kontribusi terhadap total ekspor nasional 2021 sebanyak 1,83%," ujar Kepala BPS Margo Yuwono, kemarin. **17-7**

BPS juga mencatat, upah nominal harian buruh tani nasional pada Desember 2021 naik 0,17% dari November 2021, dari Rp 57.081 menjadi Rp 57.180 per hari. Sementara upah riil buruh tani turun 0,65%. Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan. **(ti)**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PERTANIAN

Ketimpangan Lahan

Wajah Jiyo (62), Paryo (49), dan Sayid (76) tampak berbinar siang itu. Mereka membolak-balik surat izin pemanfaatan hutan yang baru saja diserahkan Presiden Jokowi Widodo di lapangan Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sambil berlesehan, mereka bersenda gurau dan saling mengintip isi surat. "Dengan (surat) ini, saya jadi lebih tenang (menggarap lahan)," kata Paryo.

Pada hari itu, pemerintah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada tujuh kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan di tujuh kecamatan di Pemalang dan Boyolali yang mencakup 1.890 hektar kawasan hutan untuk 1.687 keluarga penggarap. SK serupa diserahkan untuk lahan 2.144 hektar di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, serta 2.827 hektar untuk penggarap di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Jember, Jawa Timur, beberapa hari sebelumnya.

Peristiwa itu terjadi lebih dari empat tahun lalu. Namun, senyum dan binar wajah mereka masih terbayang, terlebih sebagian besar petani masih berjuang mengatasi problem lahan. Luas kepemilikan dan lahan garapan terfragmentasi makin sempit. Namun, dengan surat keputusan itu, mereka mendapatkan kepastian untuk memanfaatkan lahan negara untuk usaha produktif selama 35 tahun. K. S.

Lahan merupakan faktor produksi yang tak tergantikan. Maka, ketika pemerintah mengizinkan pemanfaatan lahan negara, petani dan keluarga penggarap menyambutnya dengan sukacita. Apalagi, ada ketimpangan penguasaan. Ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan masih terjadi sehingga pemerintah merasa perlu memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar lebih merata, transparan, dan adil.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/1/2022), Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah mencabut izin-izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan kepada pihak lain, serta tidak sesuai peraturan dan peratutan. Penertiban izin itu bagian integral dari perbaikan tata kelola perizinan usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Redistribusi lahan

Pemerintah mencabut 2.078 izin pertambangan mineral dan batubara karena perusahaan tidak mengerjakan izin selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan di lahan seluas 3.126 juta hektar (ha) serta 137 izin perkebunan karena alasan serupa.

Setelah pencabutan itu, pemerintah berencana menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain yang dinilai lebih kredibel, termasuk kelompok masyarakat adat, organisasi keagamaan, badan usaha milik daerah, dan koperasi. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah itu dan berharap ada upaya serius untuk memperbaiki tata kelola sumber daya

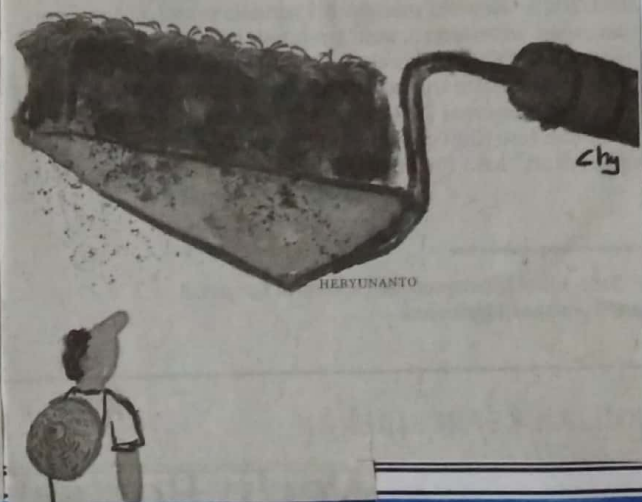
alam dan menuntaskan konflik agraria.

Soal penguasaan lahan menjadi problem yang belum terselesaikan di hulu. Sensus pertanian merekam gejala makin sempitnya penguasaan lahan oleh petani. Sensus pertanian tahun 2013 mencatat, jumlah petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektar (petani gurem) mencapai 14,2 juta petani atau 55,2 persen dari total rumah tangga petani. Namun, pada survei antarsensus tahun 2018, jumlahnya bertambah menjadi 15,8 juta petani atau 58 persen dari total petani.

Selain gejala "guremisasi", sektor pertanian masih menghadapi tantangan besar terkait lahan, yakni alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Data Sensus Pertanian 2003 dan 2013 menunjukkan 508.000 hektar lahan pertanian di Pulau Jawa beralih kepemilikan dari rumah tangga petani ke nonpetani. Alih kepemilikan terbesar, yakni 204.318 hektar (40 persen), terjadi di lahan seluas kurang dari 0,1 hektar yang selama ini menjadi sumber pencarian petani gurem.

Ketimpangan penguasaan lahan juga menjadi problem. Sebanyak 56 persen rumah tangga tani menguasai 13,3 persen lahan atau luas kepemilikan rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Dengan rata-rata kepemilikan lahan yang "mungil", petani akan selalu kesulitan mengejar skala keekonomian. Hasil usaha jadi tidak mencukupi kebutuhan sehingga tak sedikit yang akhirnya menjual lahannya dan beralih profesi ke luar sektor pertanian.

Sejumlah lembaga non-pemerintah berharap evaluasi izin-izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan berujung pada langkah konkret mengatasi ketimpangan agraria dan penguasaan lahan. Mereka berharap lokasi-lokasi lahan yang dicabut izinnya ditetapkan sebagai tanah obyek reforma agraria dan didistribusikan kepada petani dan rakyat yang tak punya tanah. Dengan demikian, penguasaan lahan tidak semakin timpang dan para petani gurem memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki nasibnya. (MUKHAMAD KURNIAWAN)



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 16/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo

Kepada Milenial, Jadilah SDM Unggul dan Kuasai Pasar

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) menjadi SDM unggul yang mampu membawa komoditas pertanian Indonesia semakin menguasai pasar dunia. Apalagi Indonesia merupakan negara subur yang bisa menghasilkan produksi pertanian berskala besar.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian baru saja melepas ekspor akhir tahun di 34 Provinsi Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,4 triliun. Adapun komoditas yang diekspor diantaranya buah manggis, pisang, kapulaga, kunyit, jagung dan tapioka. **St. 2**

Ada juga dari subsektor perkebunan seperti sawit, kelapa bulat dan kopi. Sedangkan dari subsektor peternakan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 18/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☒ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

meliputi babi potong, daging dan serangga hidup. Sementara dari sayuran, ekspornya meliputi kacang hijau dan produk hortikultura lainnya.

Saya berharap pendidikan yang dilakukan Polbangtan dalam berbagai rumpun ilmu terapan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dan menguasai pasar dunia.

Saya berharap agar Polbangtan terus melaksanakan topoksi Tridharma Perguruan Tinggi dalam melakukan pengawalan dan pendampingan program utama Kementan. Misalnya, peningkatan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani dan penumbuhan wirausaha baru di bidang pertanian.

Karena itu saya mengharapkan agar Polbangtan Gowa bekerja keras dalam melahirkan petani milenial yang maju, mandiri dan modern. Saya juga mendorong mahasiswa Polbangtan melakukan langkah cepat dalam membuat inovasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia.

Mahasiswa, harus bisa beradaptasi dan menghadapi segala macam tantangan yang kini semakin berkembang pesat. Yang paling pertama harus kita perbaiki adalah kemampuan kita dalam melakukan apapun fungsi dan peranan kita. Mahasiswa harus bisa berkembang, memiliki inovasi dan siap bersaing. Begitu juga dengan dosen harus terus mengasah kemampuan menaaiarnya. **

2